



PKL, Etos dan Problema Keberadaan

RELOKASI pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro sudah dimulai Februari 2022. Dua tempat menjadi shelter baru bagi PKL; eks Gedung Bioskop Indra dan eks Gedung Dinas Pariwisata Yogyakarta. Dua lokasi itu dapat menampung lebih dari 1.800 pedagang. Relokasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya juga dilakukan untuk menaikkan kelas UMKM. Yang ujungnya, menyejahterakan masyarakat secara ekonomi.

McGee (1971) berani mengatakan, etos kerja para pedagang sektor informal seperti ini sesungguhnya merupakan benih-benih tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Masalahnya mam-puk pemerintah membantu mereka untuk mewujudkan impiannya yakni memperbesar peluang usahanya agar maju dan sejahtera?

Negara Maju

Tuntutan ini dikemukakan karena di negara-negara maju seperti Inggris, Rencana Tata Ruang Kota Liverpool misalnya, memberi ruang gerak usaha bagi para PKL, yakni mereka diberi zona khusus dengan fasilitas yang sangat membantu kelangsungan usahanya. Demikian pula di India, pemerintah Kota Madras bahkan mendirikan pondok-pondok *boro* (bagi para penglaju) yang murah yang dekat dengan tempat kerja PKL ini. Karena ada bantuan pelayanan seperti ini, tingkat penghasilan PKL cukup tinggi, sehingga mampu memba-yarkan untuk kebersihan kota.

Fenomena PKL memang lebih khas terdapat di negara-negara berkembang. Karenanya para ekonom dalam menganalisis kegiatan ekonomi penduduk, biasanya dititikberatkan kepada, proporsi angkatan kerja yang bekerja menurut sektor, trend atau kecenderungan perpindahan (terutama dari sektor pertanian ke sektor lain), dan penyebab kepindahan tersebut beserta implikasinya.

Para ekonom memandang bahwa ke-berhasilan pembangunan suatu negara,

Saratri Wilonoyudho

indikasinya antara lain ditandai oleh kecepatan pertumbuhan di sektor industri manufaktur yang disertai peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan (Manning, 1988). Tetapi sektor industri sangat rendah dalam menyerap angkatan kerja, karena jenis industri yang dikembangkan pada umumnya adalah industri yang padat modal yang



KR-JOKO SANTOSO

hanya mempekerjakan para pekerja yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi.

Sebagaimana telah ditunjukkan terdahulu, sektor informal mendominasi aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta. Membengkaknya jumlah sektor informal tidak lepas dari sulitnya memasuki sektor formal. Kalau pada tahun 70-an BPS melaporkan bahwa jumlah PKL di perkotaan mencapai 25% dari angkatan kerja perkotaan, pada tahun 80-an naik menjadi 35%, dan tahun 90-an sudah menjadi 39%, diperkirakan tahun 2020 ini mencapai angka lebih dari 70%.

Dua Sisi

Umumnya rata-rata pekerja di sektor informal antara umur 25 tahun sampai 54 tahun. Ini merupakan kelompok usia

produktif. Gejala dominasi sektor informal di kota-kota negara berkembang termasuk Kota Yogyakarta dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, sektor informal di kota-kota besar itu ibarat 'katup penyelamat'. Karena sulitnya mencari pekerjaan terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan yang cukup.

Pandangan kedua menilai, hadirnya sektor informal yang dominan di kota-kota besar sebagai bentuk gejala ketidakseimbangan pembangunan. Sektor informal nyaris tidak memiliki batas untuk dimasuki siapa saja karena kemudahannya tersebut. Namun pada umumnya hasilnya hanya sekadar untuk menyambung hidup (ekonomi subsisten). Meski tidak menutup mata ada beberapa pengusaha di sektor informal kemudian sukses dan mendirikan sektor formal.

Beberapa hasil penelitian men-duga bahwa Kota Yogyakarta terus mampu menyerap pekerja informal. Masalahnya pemerintah kota sering kali tidak siap untuk menata sektor ini sehingga muncul konflik sosial. Apalagi media massa terutama televisi swasta, hampir setiap saat melaporkan bentrok fisik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan para pedagang kaki lima (PKL) di pelbagai kota. □

*) **Prof Dr Ir Saratri Wilonoyudho MSi**, peneliti di Dewan Riset Daerah dan Ketua Koalisi Kependudukan Jawa Tengah

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005